



Ulasan

Gerakan Banten Eliminasi TB sebagai Upaya Percepatan Pemberantasan TB di Provinsi Banten

***Husnul Amri**

Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Banten

(Diterima 5 Januari 2018; Direvisi 12 Pebruari 2018; Disetujui 20 Pebruari 2018; Diterbitkan 11 Maret 2018)

Abstrak: Penyakit TB (Tuberculosis) atau banyak orang menyebutnya TBC adalah merupakan penyakit menular yang sudah merupakan masalah kesehatan masyarakat, bahwa sejak tahun 1993, Badan kesehatan dunia WHO menyatakan penyakit TB (Tuberculosis) merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. kendatipun pendekatan strategi DOTS telah terbukti sangat efektif, setelah sejarah panjang berbagai strategi program telah dilakukan pengendalian TB, namun beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam “Terobosan Menuju Akses Universal Strategi Nasional Pengendalian TB Di Indonesia 2010-2014 (2011;10) mengemukakan bahwa Sejak tahun 2003 setelah diterapkannya strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) ada banyak mengalami kemajuan perkembangan penanggulangan penyakit TB, namun diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB di seluruh dunia (WHO, 2009). Terlebih penyakit menular semakin menggeliat penularannya karena seiring perubahan dberbagai aspek baik social, ekonomi, budaya dan lain-lain, maka pengendalian penyakit TB mendapat tantangan baru seperti ko-infeksi TB/HIV, TB yang resisten obat dan tantangan lainnya dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi.

Provinsi Banten berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kasus TB di Indonesia pada tahun 2017 menduduki posisi ke 8 dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu dengan 16.608 kasus, sedangkan beban TB ini baru dicapai 42% yakni dari perkiraan kasus TB 40.277 ditemukan 17.108 kasus. Oleh karena Kesuksesan dalam penanggulangan TB adalah dengan menemukan penderita dan mengobati penderita sampai sembuh, maka diperlukan suatu inovasi strategi komitmen dan kebijakan pengambil keputusan seperti yang dilakukan provinsi Banten dengan melakuka Gerakan Banten Eliminasi TBC (Pencarian terduga penderita TB secara pasif,masif aktif,intensif dan masif oleh OPD dan komponen masyarakat Banten, diperiksa lab dan klinis, diobati dan dipantau sampai sembuh).

Keyword : Gerakan Banten Eliminasi TB

Koresponding : Husnul Amri, email: amryhusnul@yahoo.co.id mobile phone: 081319189666

Pendahuluan

Bahwa Pembangunan bidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat adalah merupakan bagian yang penting dan sangat strategis terutama dalam upaya

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas dan sehat bebas dari penyakit dan penyakit menular. Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai penyakit baik penyakit tidak menular tertentu dan penyakit menular di Indonesia sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Khususnya beberapa penyakit menular di Indonesia memerlukan keseriusan baik upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasannya mengingat potensi penularannya jika tidak dibarengi dengan komitmen yang kuat dari semua tingkatan pengambil kebijakan maka akan terjadi akselerasi penularan akan lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan penanggulangannya, salah satu diantaranya adalah penyakit menular TB(Tuberculosis).

sebagaimana menurut Kementerian Kesehatan RI Ditjen P2PL dalam Pedoman Nasional Pengendalian TB (2014:2) Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang menular disebabkan oleh kuman kelompok Mycobacterium yaitu Myobaterium Tuberculosis. Penularan melalui udara dan sumber penularan adalah pasien TB yang dahaknya mengandung kuman TB. Gejala umum TB pada orang dewasa adalah batuk yang terus menerus dan berdahak selama 2 minggu atau lebih, bila tida diobati maka setelah lia tahun sebagian besar (50%) pasien akan meninggal.

Mulai tahun 1995, program pengendalian TB nasional mengadopsi strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse), yang direkomendasikan oleh WHO, karena strategi ini telah dibuktikan dengan berbagai uji coba lapangan dapat memberikan angka kesembuhan yang tinggi, bahkan juga dari aspek pembiayaan strategi DOTS merupakan strategi yang paling cost effective. Hal tersebut diantaranya menjadi pemikiran untuk mengoptimalkan penerapannya diharapkan disetiap sarana pelayanan kesehatan , karena sejalan dengan meningkatnya kasus TB pada tahun 1993 WHO menyatakan Global Emergency TB, dan merekomendasikan pengendalia TB dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course).

Sebagaimana dijelaskan Ditjen P2PL Kemenkes RI dalam pedoman Pengendalian TB (2014:5) bahwa "Pada tahun 2013 muncul usulan dari beberapa negara anggota WHO yang mengusulkan adanya strategi baru untuk mengendalikan TB yang mampu menahan laju infeksi baru,mencegah kematian akibat TB, mengurangi dampak ekonomi akibat TB dan mampu meletakkan landasan ke arah eliminasi TB".

Upaya percepatan Eliminasi TB akan tercapai bila angka insidensi TB berhasil diturunkan mencapai 1 kasus TB per 1 juta penduduk, sedangkan kondisi yang memungkinkan pencapaian eliminasi TB (pra eliminasi) adalah bila angka insidensi mampu dikurangi menjadi 10 per 100.000 penduduk. Dengan angka insidensi global tahun 2012 mencapai 122 per 100.000 penduduk dan penurunan angka insidensi sebesar 1-2% setahun maka TB akan memasuki kondisi pra-eliminasi pada tahun 2160. Untuk itu perlu

ditetapkan strategi baru yang lebih komprehensif bagi pengendalian TB secara global. (Ditjen P2PL Kemenkes RI, 2014)

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Bab I Ketentuan Umum Ps:1) Menjelaskan :

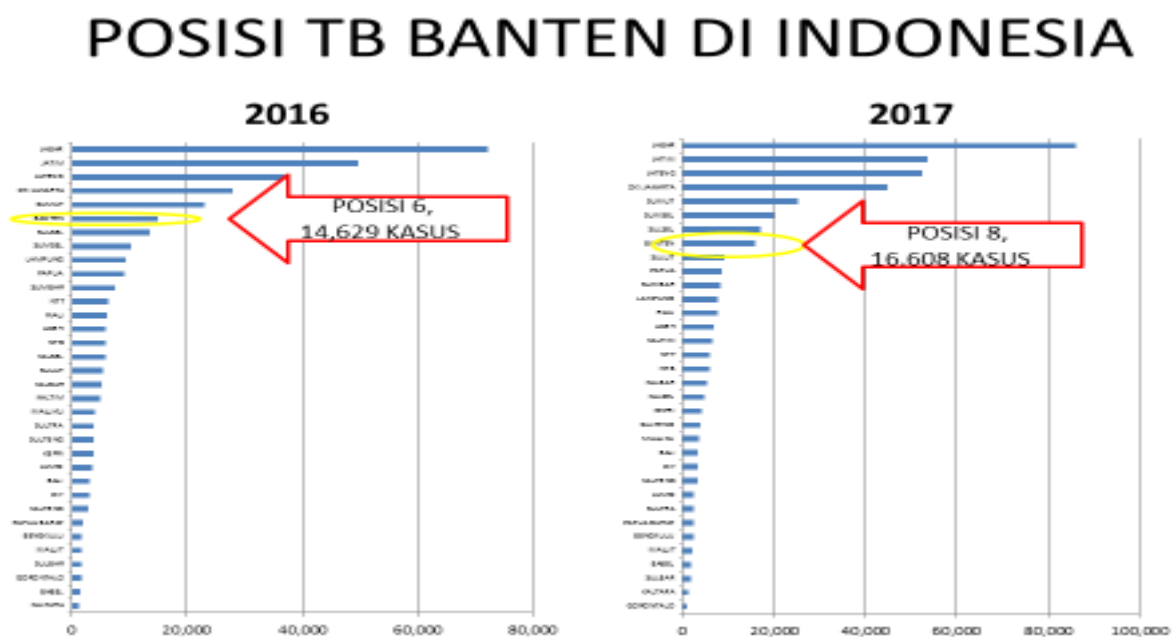
“Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.”

Provinsi Banten berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kasus TB di Indonesia pada tahun 2017 menduduki posisi ke 8 dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu dengan 16.608 kasus, sedangkan beban TB ini baru dicapai 42% yakni dari perkiraan kasus TB 40.277 ditemukan 17.108 kasus. Oleh karena Kesuksesan dalam penanggulangan TB adalah dengan menemukan penderita dan mengobati penderita sampai sembuh, maka diperlukan suatu inovasi strategi komitmen dan kebijakan pengambil keputusan seperti yang dilakukan provinsi Banten dengan melakukan Gerakan Banten Eliminasi TBC (Pencarian terduga penderita TB secara pasif,masif aktif,intensif dan masif oleh OPD dan komponen masyarakat Banten, diperiksa lab dan klinis, diobati dan dipantau sampai sembuh), hal ini juga sesuai kebijakan Kemenkes RI yang menargetkan Indonesia berhasil mengeliminasi penyakit TB (Tuberkulosis) pada Tahun 2030.(<https://m.detik.com>).

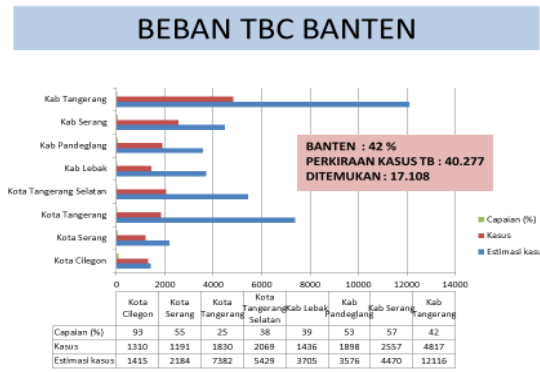
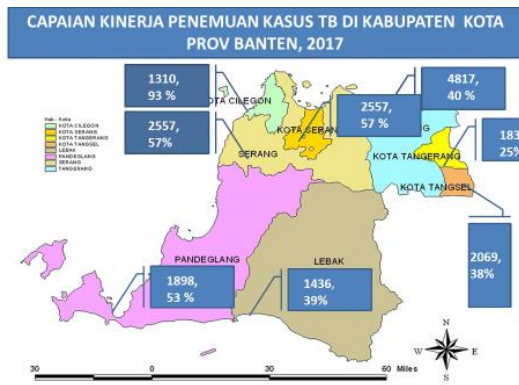
Banten Gerakan Eliminasi TB adalah merupakan suatu upaya keseriusan pemerintah daerah Banten khususnya dalam memerangi penyebaran penyakit TB dengan mendorong kepedulian dan kesadaran semua komponen stakeholder termasuk masyarakat yang rentan terhadap penularan penyakit TB. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini masih banyak penderita TB baik yang aktif maupun yang sebenarnya sudah tertular namun kumannya tidur (dormant), masih belum memiliki keadanan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang akhirnya tidak sembuh secara tuntas, bahkan juga dikarenakan keperlambatan diagnosa atau juga karena factor lain timbulnya masalah baru yang bias mengakibatkan sulitnya pencapaian Elimiasi TB seperti MDR (Multi Drug Resistent), TB HIV, TB DM, TB Rokok dan Termasuk TB pada perempuan). Kondisi tersebut juga tentu dipengaruhi oleh factor social, ekonomi dan budaya yang tidak boleh kita abaikan dalam melakukan program eliminasi TB dengan jargonnya TOSS TB (Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis).

Pembahasan

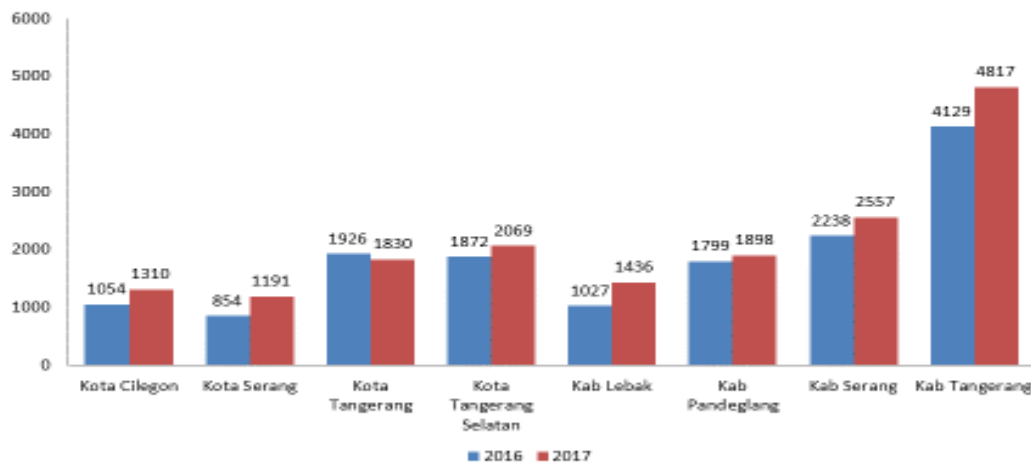
Berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kasus TB di Indonesia pada tahun 2017 menduduki posisi ke 8 dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu dengan 16.608 kasus, hal tersebut menggambarkan posisi Banten memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi kasus TB secara nasional. Sebagai dalam grafi dibawah ini.



Sedangkan jika dilihat dari capaian kinerja penemuan Kasus TB di kabupaten /Kota Provinsi Banten 2017 sedangkan beban TB ini baru dicapai 42% yakni dari perkiraan kasus TB 40.277 ditemukan 17.108 kasus, hal ini menggambarkan perlu dioptimalkan kembali upaya capaian tersebut dengan perluasan jagkauan penemuan kasus pada sasaran potensial.



Capaian kasus TBC 2016 & 2017



ANALISIS PENYEBAB: berdasarkan data pada grafik diatas dapat dianalisis beberapa kemungkinan penyebab diantaranya :

- Missing Case (kasus yg belum terdeteksi):
- Masih banyak masyarakat yg belum menerima informasi TBC scr benar
- Masih banyak Suspek yg belum didiagnosis TBC
- Sebagian besar layanan kes swasta belum melaporkan kasus TBC
- Masih banyak layanan kes swasta yg tidak memakai strategi DOTS dlm tatalaksana TB
- Kurangnya pengetahuan masyarakat utk mencari layanan TBC di fasyankes
- Kepatuhan minum obat yang rendah:
- Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pentingnya minum obat sampai sembuh

- Tingginya Biaya pengobatan TBC di fasyankes swasta
- Belum optimalnya peran PMO

Adapun Faktor Resiko yang mempengaruhi diantaranya:

- Belum terkendalinya faktor resiko penularan TB (rumah sehat, Kepadatan hunian, mobilitas, etika batuk)
- Pola Hidup Sehat belum menjadi kebiasaan masyarakat Kesembuhan
- Kurangnya asupan gizi berupa PMT pemulihan untuk mendukung kesembuhan

Solusi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pengelolaan Program TB di Kemenkes RI (Ditjen P2PL Modul Pelatihan Tatalaksana TB Bagi Pengelola Program TB/Tim DOTS di Faskes/RS, 2105: ...), bahwa pada tahun 2013 beberapa negara anggota WHO mengusulkan adanya strategi baru untuk mengendalikan TB yang mampu menahan aju infeksi baru, mencegah kematian akibat TB, menurangi dampak ekonomi akibat TB dan mampu meletakkan ke arah eliminasi TB.



1. Menemukan orang dengan “batuk berdahak” dilakukan dengan cara:

- ✓ Melakukan kegiatan dari pintu ke pintu rumah untuk identifikasi apakah ada penghuni rumah dengan “Batuk Berdahak”
 - ✓ Memeriksa semua kasus dengan “batuk berdahak” yang berobat ke fasyankes dengan pemeriksaan TB.
 - ✓ Melakukan promosi dan sosialisasi secara langsung maupun mell media sosial
2. Menentukan terduga TB dengan pemeriksaan lanjutan di Fasyankes (Lab dan klinis), dengan cara:
- ✓ Memastikan semua Puskesmas menyediakan pemeriksaan laboratorium dan melakukan pemeriksaan secara gratis.
 - ✓ Dinkes Provinsi menyiapkan dan menyediakan logistik Pemeriksaan laboratoris berupa Reagen ZiehnNielsen,Potdahak,ObjectGlass,
3. Mengobati semua kasus secara efektif untuk mengurangi angka kematian, kesakitan, yaitu :
- ✓ Memastikan ketersediaan semua jenis obat TBC sesuai dengan program dan kategorinya.
 - ✓ Mengoptimalkan Pengawas Minum Obat (PMO)
4. Pengendalian resiko Tuberkulosis dengan Lingkungan dan Rumah Sehat, yaitu dengan melakukan:
- ✓ Memasyarakatkan buka jendela
 - ✓ PHBS
 - ✓ Etika batuk

Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka diperlukan langkah konkrit sebuah aksi nyata agar terwujudnya “Gerakan Eliminasi TB” di Provinsi Banten perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas program dengan berbagai Stakeholder dengan membangun komitmen yang mantap serta kesadaran semua komponen sesuai kapasitas masing-masing pentingnya melakukan upaya-upaya nyata dalam mendoong percepatan eliminasi TB di provnsi Banten.

Beberapa tahapan kegiatan yang penting dilakukan diantaranya :

- a. Sosialisasi & Advokasi :Sosialisasi langsung dan mell medsos, Advokasi bagi OPD dan Organisasi Profesi, Asosiasi fasyankes, dll
- b. Kapasitas Lintas sektor &Lintas program : Workshop, Pelatihan
- c. Pencanaan Gerakan Eliminasi TB :Bersamaan dengan perencanaan GERMAS dan Pemeriksaan Terduga TB dan co infeksi
- d. Intensifikasi penemuan terduga TB: Pasif, Aktif, Massif
- e. Monitoring Secara berjenjang oleh semua Stake holder

Merujuk kepada Kemenkes RI dalam "Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS" (2018;22), menjelaskan Formulasi Strategi Eliminasi TB, sebagai berikut:

Pengembangan dan formulasi Strategi Penanggulangan Tuberkulosis yang baru didasarkan pada:

- Hasil survei prevalensi 2013-2014, yang menunjukkan bahwa TB mempengaruhi orang-orang dari semua usia atau golongan, dengan orang-orang miskin yang paling terpengaruh. Pria lebih banyak terkena daripada wanita dan orang di daerah perkotaan lebih banyak daripada di daerah pedesaan. Faktor risiko lain adalah penderita gizi buruk, narapidana, dan orang-orang dengan sistem kekebalan yang terganggu, termasuk HIV dan diabetes, rentan terhadap TB.
- Pelaporan/notifikasi kasus TB oleh program terus landai sebesar 30%, menunjukkan bahwa perubahan pendekatan, metode dan strategi sangat diperlukan
- Perkembangan terbaru manajemen dan alat diagnostik TB.
- Berbagai temuan dan rekomendasi Joint External Monitoring Mission (JEMM) 2013 dan 2016.
- Komitmen pemerintah pusat dan daerah serta dunia yang memberikan perhatian tinggi terhadap masalah

Penutup

Bahwa untuk mewujudkan suksesnya Gerakan Banten Eliminasi TB adalah sebuah tantangan besar, karena masih banyaknya kasus yang belum dinotifikasi itu karena belum dilaporkan atau mungkin akses yang belum terjangkau. Maka optimalisasi program penanggulangan TB hendaknya dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergis baik lintas program maupun lintas sektor.

Implementasi Gerakan Banten Eliminasi TB adalah sebuah keniscayaan yang harus terus dioptimalkan dengan memantapkan promosi program TOSS TB (Temukan Obati Sampai sembuh Tuberkulosis) dengan terus meningkatkan upaya-upaya preventif penularan TB yang realistis yaitu pengendalian faktor risiko baik lingkungan dan rumah sehat,

Hal lain pentingnya Komitmen Kepemimpinan tiap jenjang administrasi termasuk Kepemimpinan dalam Gerakan Banten Eliminasi tuberkulosis: memperkuat komitmen di kabupaten/kota, yakni diantaranya dalam hal pembiayaan dan regulasi; Penanggulangan TB menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan prioritas, menjadi salah satu dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan

Program Penanggulangan TB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan inisiasi untuk memperkuat komitmen dan kepemimpinan eliminasi TB di tingkat kabupaten/kota, dengan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) 5 tahunan untuk memastikan arah dan target pencapaian menuju eliminasi TB. RAD tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Kepada Daerah (Perkada) dan Peraturan Daerah (Perda). RAD adalah dokumen referensi baik untuk pelaksanaan maupun kepastian alokasi pembiayaan yang diperlukan berdasarkan rencana yang dibuat. (Kemenkes RI dalam "Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS" (2018;27),

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; Terobosan Menuju Akses Universal Strategi Nasional Pengendalian Tb Di Indonesia 2010-2014, Jakarta, 2011

Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Pedoman Nasional Pengendalian P2 TB, Jakarta ,2014

Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI ,Modul Peltihan Tatalaksana TB Bagi Peengelola Program TB/Tim DOTS di Faskes/RS; Jakarta,2015

Kemenkes RI, "Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS, Jakarta, 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

<https://m.detik.com>